

PEMBUKTIAN KEKUATAN HUBUNGAN ANTARA NILAI-NILAI PANCASILA DENGAN KEWARGANEGARAAN

Eko A Meinarno

Sri Fatmawati Mashoedi

Prodi Psikologi Sosial, Universitas Indonesia
Jl. Lkr. Kampus Raya, Pd. Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat
email: snipsnape@yahoo.com

Abstract: This study aimed to examine the relationship between the values of Pancasila in shaping a sense of citizenship in teenagers. Teenagers are the future residents of a nation that is expected to embody the values of Pancasila in public life. These values are inculcated through education at school, and could result in the creation of a sense of citizenship in teenagers. This study uses quantitative methods involving 297 high school students from the country, religious-affiliated schools and boarding school in West Java. Pearson correlation test showed a positive correlation and significant at all values of Pancasila and a sense of citizenship, which is the first principle, the second principle, third, fourth, and fifth. Thus, the higher the values of Pancasila individual then come high sense of citizenship. In particular, the strongest relationships arise from values of social justice and citizenship.

Keyword: pancasila, citizenship, teenager, values

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara nilai-nilai Pancasila dalam membentuk rasa kewarganegaraan pada remaja. Remaja adalah penduduk masa depan suatu bangsa yang diharapkan mengejawantahkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu ditanamkan melalui pendidikan di sekolah dan dapat bermuara pada terciptanya rasa kewarganegaraan pada remaja. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan 297 siswa dari sekolah menengah atas negeri, sekolah berafiliasi agama, dan pesantren di daerah Jawa Barat. Uji korelasi pearson menunjukkan adanya terdapat korelasi yang positif dan signifikan pada semua nilai Pancasila dan rasa kewarganegaraan, yaitu sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dengan demikian, semakin tinggi nilai Pancasila individu maka rasa kewargaannya ikut tinggi. Secara khusus hubungan terkuat muncul dari nilai keadilan sosial dan kewarganegaraan.

Kata Kunci: pancasila, kewarganegaraan, remaja, nilai

Kelahiran negara Indonesia tidaklah sama dengan kelahiran negara-negara lain di dunia. Keberagaman adalah benih dasar Indonesia. Oleh karenanya, ia tidak sama dengan kelahiran negara-negara yang sedari awal nyaris satu bangsa. Isu negara yang multi etnis adalah apakah telah ada kesadaran untuk menjadi satu bangsa?. Penelitian terkait hal ini umumnya mengarah pada pengkajian masalah identitas nasional.

Pengkajian yang ditujukan pada faktor warga negaranya juga memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kewarganegaraan membahas tentang hak dan kewajiban anggota masyarakat

sebagai warga negara yang sah yang sah dengan negaranya. Dahulu kala, kewarganegaraan hanya dimiliki oleh orang-orang yang merdeka, dan budak tidak memilikinya (Dewi, Semiarno, Poerbasari, Meinarno, 2013). Beberapa hak dan kewajiban warga negara yang diketahui paling umum adalah partisipasi dalam penyusunan undang-undang, pelaksanaan administrasi negara, pelaksanaan aktivitas keagamaan dan bisa masuk dinas militer (Poole, 1999 dalam Dewi, dkk. 2013).

Remaja merupakan bagian warga negara berperan sebagai penduduk masa depan suatu bangsa. Para remaja Indonesia tumbuh dan berkembang di suatu lingkungan kebangsaan yang

berlatar belakang multietnis lengkap dengan segala keberagamannya. Kepedulian dan keikutsertaan remaja dalam ritual keagamaan kemungkinan masih rendah sebagaimana ditemukan Josic (2011) bahwa pola kewarganegaraan pada remaja yang mencakup pembentukan makna rasa memiliki, keterlibatan (ikatan), dan kesuksesan dalam komunitas mereka. Peneliti menduga bahwa pola yang sama juga terjadi pada para remaja di Indonesia.

Pembangunan rasa kewarganegaraan ataupun kelompok diperlukan kesamaan nilai. Nilai-nilai dasar mengikat sebuah bangsa yang dalam konteks Indonesia adalah Pancasila yang nilainya sudah disepakati. Sebagai sebuah nilai, falsafah dasar negara ini menjadi sifat-sifat yang dianggap penting untuk diinternalisasi masyarakat Indonesia. Melalui penanaman nilai Pancasila dalam kurikulum sekolah diharapkan rasa kewarganegaraan terpupuk dalam diri remaja, sehingga kelak dapat terbentuk masyarakat negara yang ideal. Hal ini penting mengingat kewarganegaraan adalah sebuah status yang disematkan pada anggota utuh komunitas yang diformulasikan ke dalam bentuk hak dan tugas warga negara (Marshall, 1997 dalam Meer, 2010) sehingga diharapkan dengan kewarganegaraan yang baik, seseorang dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

Penelitian ini hendak mengungkap bagaimana hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Studi kali ini dengan melakukan pengukuran terhadap kedua variabel. Umumnya penelitian keduanya adalah kajian pustaka semisal kajian Hidayat (2011) dan Sarbaini (2011). Dengan demikian penelitian ini dapat memberi cara pandang baru terhadap dua variabel yang penting bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

NILAI PANCASILA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, nilai didefinisikan sebagai sifat atau hal yang dianggap penting atau berguna bagi masyarakat. Rokeach (1973) mengatakan bahwa nilai merupakan tujuan yang ingin dicapai (*end-state of existence*) dan juga sebagai cara bertingkah laku. Bertens (2007) menyebutkan bahwa nilai merupakan hal-hal yang diinginkan dan senantiasa berkonotasi baik. Dapat dikatakan, nilai adalah pedoman bertingkah laku yang

keberadaannya diharapkan muncul pada anggota suatu kelompok.

Pancasila merupakan kumpulan lima nilai unidimensional yang dijadikan acuan tingkah laku bangsa Indonesia. Kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan (sila 1), kemanusiaan (sila 2), patriotisme (sila 3), demokrasi (sila 4), dan keadilan sosial (sila 5). Merujuk pada sejarah jauh sebelum Soekarno menggali nilai Pancasila yang dikenal saat ini, konsep Pancasila sudah lebih dahulu terdokumentasi dalam kitab Sutasoma milik Mpu Tantular. Kitab tersebut merumuskan lima karma, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras (Daroeso, 1989).

Dijadikannya lima poin Pancasila sebagai landasan bernegara bukan tanpa alasan. Kelima nilai tersebut dianggap sudah menjadi nilai yang berkembang di masyarakat sejak dahulu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soetarto (2006) bahwa para tokoh perumus Pancasila bukanlah pencipta, tetapi mereka adalah penggali nilai-nilai yang ada dari bangsa Indonesia dan disarikan menjadi Pancasila (Latief, 2013). Oleh karena itu, sudah tentu Pancasila merefleksikan nilai-nilai yang diharapkan muncul pada masyarakat Indonesia.

Suwartono dan Meinarno (2011) ketika melakukan penelitian lanjutan tentang alat ukur Pancasila yang berhasil mengungkap bahwa Pancasila adalah nilai-nilai yang berdiri mandiri atau unidimensional. Hasil ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Soekarno bahwa Pancasila adalah kumpulan nilai, bukan sebaliknya. Hasil ini pula yang menempatkan pandangan Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru yang sering menegaskan Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh tampaknya goyah secara akademik. Penelitian yang dilakukan Juneman dan Meinarno (2013) juga menunjukkan adanya pola khusus dari Pancasila terhadap isu identitas agama.

Sila pertama dalam Pancasila mencakup nilai ketuhanan. Pencantuman nilai ketuhanan dalam landasan kehidupan bernegara bukanlah hal yang baru di dunia ini. Negara di dunia seperti Perancis pun berdiri dengan mengenakan agama Katolik sebagai identitas mereka. Meskipun tidak ada agama tertentu yang dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia, poin keagamaan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara di Indo-

Tabel 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila

Sila 1 Ketuhanan	Sila 2 Kemanusiaan	Sila 3 Patriotisme	Sila 4 Demokrasi	Sila 5 Keadilan sosial
Subnilai: faithfulness, toleransi pada kelompok yang berbeda keyakinan, <i>spirituality and religiousness</i>	Subnilai: respek, fair, courage.	Subnilai:loyalitas, citizenship (memiliki pendirian yang kuat terhadap kewajibannya, setia kawan)	Subnilai: tanggung jawab dan peace- fulness/ harmoni	Subnilai: persahabatan, keadilan dan kerendahatian, menolong

nesia. Nilai ketuhanan mengacu pada keyakinan terhadap Tuhan dan hidup dengan menjalankan perintah-Nya tanpa mengganggu urusan agama lain (Meinarno, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Juneman, Putra, & Meinarno (2012) menemukan adanya korelasi positif antara nilai pertama Pancasila dengan karakter transedensi merupakan kekuatan yang menempa hubungan individu dengan semesta yang lebih luas serta menyediakan makna. Dalam transedensi terdapat apresiasi terhadap keindahan dan keunggulan, rasa syukur (*gratitude*), harapan, humor, dan religiusitas; hal-hal yang merupakan bagian dari sila pertama. Poin ketuhanan ini mengisyaratkan harus dijunjungnya toleransi antarumat beragama. Keberadaan berbagai penganut agama berbeda di Indonesia bukan tidak mungkin dapat menimbulkan adanya konflik. Oleh sebab itu, nilai ketuhanan dianggap penting untuk dijadikan landasan kehidupan bernegara, yaitu sebagai salah satu poin yang tercantum dalam Pancasila.

Nilai mengenai kemanusiaan diangkat menjadi poin yang tercakup pada sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan yang ini lebih menekankan pada perlakuan seorang individu terhadap individu atau masyarakat lainnya. Berdasarkan sila ini, setiap orang harus menghormati dan menghargai orang lain sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, dituntut pula adanya sikap adil dalam memperlakukan orang lain, tanpa melihat suku, ras, ataupun perbedaan lainnya yang dimiliki orang lain tersebut. Penelitian secara empirik yang dilakukan oleh Juneman, Putra, & Meinarno terhadap mahasiswa di PTN Jakarta menunjukkan adanya hubungan positif antara nilai kedua dan karakter keadilan dan transedensi. Contoh pengamalan nilai pada sila kedua ini adalah tidak adanya diskriminasi masyarakat Indonesia terhadap warna kulit tertentu. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi

di Amerika Serikat yang sampai pada tahun 1960-an masih melakukan segregasi kebijakan di segala aspek kehidupan karena adanya perbedaan warna kulit (Meinarno, Widiyanto, dan Halida, 2011; 2015).

Poin mengenai persatuan dicantumkan pada sila ketiga Pancasila. Persatuan sebagai nilai ini berusaha dicapai dengan dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Penggunaan Bahasa Indonesia di berbagai kegiatan, misalnya dalam kegiatan akademis, perdagangan, pergaulan, diharapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat di Indonesia meskipun mereka berasal dari suku atau agama yang berbeda. Dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, akan terpupuk rasa persatuan bagi masyarakat Indonesia karena adanya kebakuan yang dipahami secara bersama-sama (Meinarno, 2013).

Pada sila keempat, tercantum nilai mengenai tanggung jawab dan harmoni. Nilai ini merupakan nilai yang kental bagi Indonesia yang menganut budaya demokrasi. Nilai sila keempat lah yang mendasari warga negara untuk dapat memahami keputusan yang diambil pemimpin (yang awalnya dipilih secara bersama pula) untuk kemaslahatan bersama (Meinarno, 2013). Nilai keempat ini juga berhubungan dengan keutamaan keadilan dan transedensi (Juneman, Putra, Meinarno, 2012). Penelitian lain yang dilakukan oleh Juneman, Meinarno, & Rahardjo (2012) menemukan adanya hubungan antara *self esteem* dan nilai keempat atau demokrasi. Temuan lainnya, bahwa semakin tinggi nilai demokrasi individu, semakin rendah pemaknaan simbolik terhadap uang (Juneman, Meinarno, & Rahardjo, 2012). Uang tidak dianggap sebagai hal yang memberikan kebebasan untuk orang lain, karena segala kebebasan yang ada dibatasi oleh kebebasan orang lain. Di sinilah kita dapat melihat tingginya penghayatan kehidupan harmoni bagi bangsa Indonesia.

Sila terakhir Pancasila mengenai keadilan sosial yang harus diwujudkan di Indonesia. Berdasarkan penelitian mengenai gambaran ikatan nilai-nilai cerita rakyat Indonesia dengan nilai Pancasila, terlihat bahwa cerita rakyat yang berada di Sumatera dan Jawa mengandung nilai yang senada dengan sila kelima Pancasila (Meinarno, 2010). Hasil penelitian tersebut seakan mengisyaratkan bahwa keadilan sosial adalah sesuatu yang memang diharapkan ada di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah pun menjadi pihak yang diharapkan dapat membantu terwujudnya keadilan sosial di masyarakat. Penelitian lain menunjukkan bahwa nilai kelima ini mempunyai korelasi dengan keutamaan keadilan dan transedensi. Tampaknya hal-hal di dalam nilai kelima ini erat dengan bagaimana rasa adil tidak semata untuk diri, tapi untuk masyarakat tempat individu berada.

Pembuatan kategori ini merupakan dampak logis dari tidak terbentuknya satu konstruk Pancasila sebagaimana yang diperkirakan sebelumnya (Suwartono & Meinarno, 2011; 2012). Justru hasil ini seakan menegaskan bahwa ide dasar yang diajukan oleh Soekarno tepat adanya yakni kumpulan nilai. Hal ini agak berseberangan dengan ide dari Soeharto yang lebih menekankan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan utuh yang masing-masing sila saling menjiwai. Dengan cara pandang itu maka Pancasila sering disebut sebagai satu konstruk.

Implikasi lainnya adalah bahwa Pancasila merupakan sistem nilai. Sistem nilai terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Dengan demikian suatu sistem nilai biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjaraningrat, 1974). Ide ini sejalan dengan pernyataan Soekarno saat rapat pada tanggal 1 Juni 1945.

KEWARGANEGARAAN

Meer (2010) mendefinisikan kewarganegaraan sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk mewakili dua fungsi pemahaman, yaitu sebagai fungsi hukum (berkaitan dengan hak berkontribusi dalam kegiatan demokrasi) dan sosial (keseimbangan resiprokal antara hak dan kewajiban yang didapat akibat kepemilikan status kependudukan).

Pentingnya telaah terhadap isu kewarganegaraan dikarenakan konsep ini masih

terbuka lebar untuk diuji dan dikaji mendalam, terlebih dengan konteks Indonesia yang multikultur. Secara khusus, warga negara kaum muda yang tengah berproses menjadi warga negara adalah subyek penting dari isu kewarganegaraan (Suryadi, 2011). Strategisnya isu ini terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Puragabaya (2012) bahwasanya kewarganegaraan berhubungan positif terhadap variabel sosial lainnya yakni patriotisme (cinta pada negara) dan nasionalisme (kebanggaan pada bangsa sendiri). Beberapa hasil penelitian yang masing-masing dilakukan oleh Abu El-Haj (2007), Bogard dan Sherrod (2008), Robles-Fernandez (2011), dan Josic (2011) menunjukkan titik penting pada evaluasi peran interaksi sosial terhadap pembentukan rasa kewarganegaraan seseorang.

Di mana pembentukan rasa kewarganegaraan? Secara lebih spesifik, Abu El-Haj (2007) menyebutkan bahwa sekolah merupakan konteks utama dari identitas dan afiliasi pemuda. Hal ini wajar karena negara perlu membuat warga di dalamnya memahami kewarganegaraan melalui institusi yang dikuasainya. Institusi pendidikan atau dalam hal ini sekolah, merupakan bagian dari instrument pemerintah untuk mengajarkan apa yang diharapkan dari warga kepada negaranya.

Bogard dan Sherrod (2008) menyatakan bahwa variabel gender, etnis, dan status imigran mempengaruhi perkembangan sikap kewarganegaraan pada pemuda. Robles-Fernandez (2011) mengemukakan bahwa melalui partisipasi sosial maka pemuda dapat terbantu untuk menjadi anggota penduduk yang aktif. Josic (2011) menemukan bahwa pemuda membentuk pemahaman mereka tentang kewarganegaraan melalui *interplay* pembentukan rasa memiliki, keterlibatan (ikatan), dan kesuksesan dalam komunitasnya.

Di Indonesia kewarganegaraan ada dalam UUD 1945 secara umum (Dewi dkk, 2013; Kaelan, 2012). Secara khusus dapat dilihat dalam pasal-pasal di dalamnya. pasal 28D yang mempunyai empat ayat menjelaskan secara umum tentang kewarganegaraan. Ayat (1) menekankan pada hak di dalam hukum dan ayat (4) mengenai kewarganegaraan.

HUBUNGAN ANTARA NILAI PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Keberadaan Pancasila sebagai fondasi kehidupan bernegara tentunya memiliki tujuan

yang dianggap bermanfaat bagi Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi aspek yang penting bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku selaku warga Negara Indonesia. Dengan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, diharapkan selaku warga Negara Indonesia, seseorang mampu memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya. Menjalankan kewajiban serta hak tersebut dilakukan sebagai implementasi status kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kewarganegaraan masyarakat di Indonesia. Hal ini didukung oleh Rida (1988, dalam Dewi dkk., 2013) yang menyatakan bahwa nilai (Pancasila) yang diamalkan dianggap memenuhi tanggung jawab individu sebagai warga negara. Namun, masih perlu dipertanyakan apakah keseluruhan dari nilai-nilai Pancasila berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memahami hak-hak dan kewajibannya selaku warga Negara Indonesia. Sejauh ini, belum ada penelitian yang melihat hubungan antara kelima sila dalam Pancasila dan kewarganegaraan.

REMAJA

Sekolah adalah bagian dari kehidupan remaja. Salah satu institusi yang membuka jalan atas proses sosialisasi bagi remaja. Peran penting sekolah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sekolah berkontribusi terhadap pembentukan negara modern saat ini (Whitty, 1997 dalam Okuma-Nyström, 2009). Penelitian-penelitian tentang bangsa dari berbagai isu seperti ingatan kolektif, identitas nasional, kelekatakan nasional amat peduli dengan institusi sekolah. Hanya di sekolah, yang dikelola pemerintah atau swasta pemerintah bisa memasuki area pribadi remaja. Semua pemerintah di dunia merasa berkepentingan terhadap institusi ini. Dengan demikian, remaja sebagai bagian dari warga dalam negara menjadi fokus dari pembentukan rasa kewarganegaraan di hampir semua negara di dunia.

METODE

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Masing-masing skor

kuesioner dijumlahkan agar dapat dikuantifikasi. Dengan hanya sekali melakukan pengambilan data pada partisipan, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian *cross-sectional study*. Berdasarkan *reference period* maka penelitian ini termasuk *retrospective study* karena menganalisis gejala yang telah terjadi di masa lampau pada diri responden. Dengan tidak adanya manipulasi yang dilakukan oleh peneliti, maka *nature of investigation* penelitian ini adalah *non-experimental study*.

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *incidental sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan ketersediaan responden dan kemauan untuk menjadi responden penelitian (Kumar, 1996). Dalam hal ini, yang menjadi responden penelitian adalah siswa sekolah menengah atas/setara di Jawa Barat. Pengambilan data yang pertama kali kami lakukan berlangsung di SMA Negeri, pesantren, SMA-SMK afiliasi agama, dan SMA Katolik di Jawa Barat.

Data yang kembali dan dapat diolah berjumlah 297 kuesioner. Rerata usia partisipan adalah 16,34 (SD=0,856). Jumlah partisipan perempuan adalah 164 orang dan jumlah partisipan laki-laki adalah 133 orang. Berdasarkan persebaran agamanya, terdapat 235 orang partisipan beragama Islam, 59 orang partisipan beragama Katolik, dan tiga orang partisipan beragama Kristen Protestan.

Pengukuran Pancasila dilakukan dengan skala keber-Pancasila-an yang dikembangkan oleh Suwartono & Meinarno (2010) dan Meinarno & Suwartono (2011). Terdapat lima dimensi dalam skala ini, yakni religio-toleransi, kemanusiaan, nasionalisme-patriotisme, demokrasi dan keadilan sosial. Secara berurutan reliabilitas dari masing-masing dimensi: 0,78; 0,70; 0,79; 0,70; 0,77 (Suwartono & Meinarno, 2012). Total item adalah 25 item. Pengukuran rasa kewarganegaraan dengan menggunakan Skala Kewarganegaraan Indonesia (SKI, 2012) yang berjumlah 18 item dengan faktor-faktor hak dan tanggung jawab, partisipasi, status, keadilan sosial, nilai.

Kedua skala yang diberikan kepada partisipan berupa pernyataan yang diajukan dalam 6 pilihan tingkat dari "1 sangat tidak setuju" sampai "6 sangat setuju" dengan tidak mengkondisikan pilihan netral.

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik statistik inferensial, yaitu generalisasi hasil yang didapatkan dari sampel

untuk menggambarkan populasi. Teknik statistik inferensial yang digunakan peneliti adalah uji korelasi Pearson dan pengolahannya menggunakan perangkat lunak statistik komputer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum diketahui bahwa rerata dari partisipan adalah yang tertera pada tabel 2. Diketahui bahwa rerata untuk semua nilai Pancasila dan kewarganegaraan yang tinggi adalah remaja perempuan kecuali pada kelompok remaja yang sekolah di pesantren.

Dalam hal perbandingan rerata skor nilai Pancasila kelompok remaja dari pesantren mempunyai pola yang khas. Ketika semua kelompok sampel tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, kelompok pesantren berdasar jenis kelamin menunjukkan pola perbedaan yang signifikan. Hal ini terlihat pada nilai pertama dan nilai kedua. Pada kedua nilai ini, kelompok remaja perempuan mempunyai skor rerata lebih tinggi

daripada remaja lelaki. Pola lainnya adalah hanya kelompok pesantren pula yang skor rerata kewarganegaraannya berbeda signifikan berdasar jenis kelamin. Skor rerata remaja lelaki pesantren lebih tinggi daripada remaja perempuan.

Hasil utama dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif signifikan antara nilai atau sila-sila Pancasila dan rasa kewarganegaraan. Ini terlihat pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa:

1. terdapat hubungan yang signifikan antara semua nilai dari Pancasila dan kewarganegaraan. Dengan demikian setiap kenaikan skor ketuhanan akan meningkatkan skor kewarganegaraan,
2. nilai yang mempunyai korelasi tertinggi adalah nilai kelima yakni keadilan sosial.

Masalah Nilai Pancasila

Perbedaan signifikan terjadi pada jenis kelamin di sekolah pesantren (Perempuan mempunyai skor lebih tinggi pada nilai ketuhanan,

Tabel 2. Tingkat partisipasi responden remaja terhadap nilai Pancasila dan kewarganegaraan

Jenis Sekolah		SMA Negeri		SMAAfiliasi Agama Islam		SMAAfiliasi Agama Katholik		Pesantren		
		Skor rerata P	Skor rata-rata L	Skor rerata P	Skor rerata L	Skor rerata P	Skor rerata L	Skor rerata P	Skor rerata L	
N		36	17	45	54	35	23	48	39	
Variabel	Pancasila	Sila 1 (Ketuhanan)	28,39	27,59	25,98	25,98	26,60	25,91	28,33*	26,85*
		Sila 2 (Kemanusiaan)	22,00	21,53	21,09	20,69	21,77	21,43	21,98**	20,15**
		Sila 3 (persatuan)	23,50	23,06	24,22	25,07	18,40	19,22	27,40	28,54
		Sila 4 (demokrasi)	25,83	25,59	25,73	25,44	24,51	23,35	27,38	26,74
		Sila 5 (keadilan sosial)	26,22	26,59	28,91	29,35	25,23	24,57	31,02	31,28
		Kewarganegaraan		89,00	86,29	89,00	87,52	81,40	80,04	92,18**

Tabel 3. asil Penelitian *Signifikan pada level 0.05 (2-tailed); **Signifikan pada level 0.01 (2-tailed)

N	Variable	Variabel Pancasila				
		Sila 1 (ketuhanan)	Sila 2 (kemanusiaan)	Sila 3 (persatuan)	Sila 4 (demokrasi)	Sila 5 (keadilan sosial)
297	Kewarganegaraan	.413**	.204**	.547**	.535**	.581**

kemanusiaan dan persatuan). Pesantren menjadi khas karena pola pendidikannya secara jelas berbeda dengan pola pendidikan sekolah umum. Pesantren adalah sekolah dengan basis agama Islam. Hal yang khas dari pesantren adalah pendidikan yang diberikan berdasar kitab suci Al Quran, dan siswanya tinggal di dalam pesantren. Para siswa di pesantren diharapkan mampu berkehidupan yang religius (Okuma-Nyström, 2009)

NILAI DAN KEWARGANEGARAAN

Adanya temuan empirik hubungan positif dan signifikan dari semua nilai Pancasila dan kewarganegaraan memperkuat dalil fungsi dari pendidikan yang secara teoretik menyatakan bahwa kewarganegaraan dapat mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila (Hidayat, 2011). Hasil penelitian ini juga secara garis besar sama dengan temuan (Mashoedi, Mahardini, & Carolina, 2012).. Sedikit perbedaannya adalah bahwa nilai pertama juga mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kewarganegaraan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor dari lima nilai Pancasila memang memiliki hubungan erat dengan skor kewarganegaraan seseorang, dalam hal ini remaja yang menjadi responden penelitian. Hubungan antara skor lima nilai Pancasila dan skor kewarganegaraan tersebut adalah positif, yang berarti kenaikan skor suatu variabel akan diikuti oleh kenaikan skor variabel lain, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, semakin responden menghayati nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama sampai kelima, maka akan semakin tinggi pula pemahaman responden akan kewajiban dan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Hubungan kuat antara sila pertama dan kewarganegaraan Nilai ketuhanan mengacu pada keyakinan terhadap Tuhan dan hidup dengan menjalankan perintah-Nya tanpa mengganggu urusan agama lain (Meinarno, 2013). Salah satu item dari SKI adalah "Saya merasakan keselarasan antara nilai-nilai yang saya yakini dengan yang orang-orang lain yakini". Berdasar hal itu maka apa yang diyakini oleh partisipan dianggap sama dengan keyakinan orang lain dalam hal ini adalah semangat toleransinya. Skor rerata tertinggi pada partisipan remaja dari sekolah negeri/pemerintah dan pesantren. Latar sosial ini menjadi khusus, karena sekolah pemerintah pada

umumnya menyelenggarakan pendidikan berdasar kurikulum yang baku. Pada sekolah pesantren, pola pengajarannya yang khas dan cenderung bertempat tinggal sama menjadi pertimbangan mengapa partisipan merasa nilai yang diyakininya sama dengan dirinya.

Adanya hubungan antara sila kedua dengan kewarganegaraan sekiranya selaras dengan keinginan dasar manusia untuk melakukan perbuatan baik dan tidak merugikan orang lain (Suneki, 2011). Menjadi warga negara yang baik hanya terjadi jika setiap warganya mampu berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. Hal ini dapat dilihat pada perilaku tidak merokok. Ia berperilaku baik (tidak merokok), dengan tidak merokok maka ia tidak merugikan orang lain (asap yang ditimbulkan dari merokok). Kira-kira seperti itulah gambaran orang yang menganut nilai sila kedua Pancasila dengan baik. Orang tersebut secara tidak langsung juga memiliki rasa kewarganegaraan yang baik. Ia secara tidak langsung juga telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, yaitu berupa penghormatan terhadap hak yang dimiliki orang lain sebagai sesama manusia.

Di sisi lain, seseorang akan mencintai berbagai benda yang khas dari Indonesia. Perilaku tersebut merupakan cerminan dari dijalankannya sila ketiga Pancasila. Penggunaan bahasa Indonesia adalah bentuk patriotisme (Meinarno, 2013; Yanovsky, 2003 dalam Sarbaini, 2011). Hubungan cukup kuat antara nilai patriotisme-nasionalisme dan kewarganegaraan juga akan berdampak pada rasa ikatan pada komunitas, mempunyai kesiapan dan komitmen untuk melayani orang lain (Kovaleva, 2008 dalam Sarbaini, 2011), terbentuknya rasa memiliki, keterlibatan (ikatan), dan kesuksesan dalam komunitas mereka (Josic, 2011). Temuan sejalan juga ditunjukkan oleh Puragabaya (2012) bahwasanya kewarganegaraan berhubungan positif terhadap variabel sosial lainnya yakni patriotisme (cinta pada negara) dan nasionalisme (kebanggaan pada bangsa sendiri). Mengenai tinggi nilai ketiga dari Pancasila dari partisipan pesantren karena mereka tinggal dalam asrama untuk waktu tertentu. Hal ini membentuk status sebagai anggota utuh komunitas yang diformulasikan ke dalam bentuk hak dan tugas warga yang dapat disetarakan dengan hak dan tugas warga negara (Marshall, 1997 dalam Meer, 2010), sehingga diharapkan dengan kewarganegaraan yang baik, seseorang dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Penelitian lain tentang

identitas nasional pada remaja Aceh menunjukkan bahwa nilai ketiga berhubungan positif (Meinarno, 2014). Bagi remaja, ketika ia merasa percaya pada tempat (negara) ia tinggal maka tingkat partisipasinya tinggi terlebih jika dilihat sebagai bentuk nasionalisme (Hart, Richardson, Wilkenfeld, 2011). Dengan demikian respon para partisipan alam penelitian ini menyumbang asumsi positif bahwa ketika nilai ketiga tinggi maka rasa kewarganegaraannya tinggi dan identitas nasionalnya tinggi. Secara keseluruhan peneliti menduga bahwa pola yang sama juga terjadi pada para partisipan penelitian ini.

Pengamalan sila keempat Pancasila dapat diwujudkan berupa partisipasi aktif seseorang dalam kegiatan bermasyarakat. Partisipasi tanpa harmoni juga tidaklah mungkin, penelitian yang diungkap oleh Juneman, Meinarno dan Rahardjo (2012) menegaskan bahwa harmoni berarti kebebasan individu dibatasi oleh keberadaan orang lain. Demikian pula sebagai warga negara, tak mungkin melakukan sesuatu sekehendak hati tanpa melihat kepentingan orang lain. Dengan berpartisipasi, seseorang berarti telah menjalankan tugas sebagai warga negara. Partisipasi adalah salah satu poin yang terdapat dalam definisi kewarganegaraan, yaitu hak sipil, sosial, budaya, dan politik yang mampu orang kemungkinan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (Castles, 2004; Castles & Davidson, 2000; Soysal, 1994 dalam Abu El-Haj, 2007). Berpartisipasi juga meningkatkan hubungan diri dengan kelompok. Tak heran hasil penelitian ini menunjukkan partisipan pesantren menunjukkan pola tinggi nilai ketiganya. Hal yang menggembirakan adalah jika kemudian terbangun pola hubungan dengan identitas nasional. Penelitian Meinarno (2014) menemukan bahwa ada hubungan antara sila ketiga dengan identitas nasional. Adapun pola yang dapat dibangun dari kedua penelitian ini adalah nilai ketiga Pancasila yang tinggi seiring dengan tingginya rasa kewarganegaraan dan identitas nasional.

Terakhir, dari sila kelima pun dapat dilihat bagaimana hubungan pengamalan sila tersebut dengan kewarganegaraan yang dimiliki seseorang. Memberikan bantuan sosial kepada daerah yang terkena bencana alam di Indonesia adalah salah satu contoh dari pengaplikasian sila kelima Pancasila. Kewarganegaraan pada orang yang mengamalkan sila kelima itupun tercapai, yaitu berupa kegiatan membantu sesama demi

terwujudnya keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan Quijada (2008) bahwa kewarganegaraan adalah posisi sosial untuk membentuk aliansi antarbudaya yang mempromosikan keadilan sosial.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kelima nilai Pancasila secara signifikan berkorelasi positif dengan skor kewargaan remaja di Indonesia. Dengan kata lain hal ini berarti penghayatan nilai-nilai Pancasila yang semakin mendalam dapat semakin meningkatkan rasa kewargaan dalam diri mereka. Rasa kewargaan lah yang diejawantahkan dalam perilaku kehidupan remaja sehari-hari dalam bentuk kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Yang menarik dari hasil penemuan kali ini adalah adanya perubahan hubungan antara nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila dengan rasa kewargaan remaja Indonesia yang kali ini terbukti berkorelasi positif, dimana pada studi sebelumnya korelasi ini tidak ditemukan signifikan (Mashoedi, Mahardini, & Carolina, 2012).

Perubahan hasil ini melemahkan argumentasi yang dikemukakan oleh Oomen (2009) bahwa dalam proses pembentukan sebuah bangsa (dan negara), agama bukanlah suatu faktor yang relevan. Di sisi lain penemuan ini secara tidak langsung menarik perhatian kembali pada karakteristik target populasi penelitian, yakni remaja Indonesia. Para remaja diindikasikan menerima pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum pendidikan di sekolah. Kita juga dapat mempertimbangkan contoh pada Reformasi Eropa yang sejak lama menjadikan dimensi keagamaan, yang tidak terlepas pula dengan ketuhanan, dan dimensi kewargaan sebagai fitur penting dalam proses reformasinya (Williams, Hinge, & Persson, 2008). Kedekatan konseptual di antara keduanya begitu dekat hingga disebutkan bahwa pendidikan keagamaan adalah utama dimana pendidikan moral, dan juga pendidikan kewargaan sebagai perpanjangannya, diturunkan dari prinsip-prinsip keagamaan (Williams, 2005 dalam Williams, Hinge, & Persson, 2008).

Dalam prakteknya di Indonesia, peran pendidikan juga memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat nasionalisme seperti pada masa Kebangkitan Nasional tahun 1908 dan semakin dikukuhkan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 serta Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 (Maftuh,

2008). Pengadaan mata ajar kewargaan di Indonesia semisal PMP (Pendidikan Moral Pancasila), PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Kn (Kewargaan), dan sebagainya, yang dianggap sebagai salah satu upaya penegakan semangat nasionalis juga tidak menafikkan fakta bahwa materi Pancasila dan UUD 1945 di dalamnya juga menyebut tentang ketuhanan.

Pendidikan kewargaan ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menggali, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang demokratis (Maftuh, 2008). Maka jika pendidikan tentang ketuhanan juga diikutsertakan dalam pendidikan kewargaan ini berarti penginternalisasian akan hak dan kewajiban individu dapat dikembangkan, dan hal ini berlaku pula untuk remaja. Nilai ketuhanan menawarkan tiga alasan mengapa ia menjadi fitur yang penting dalam memahami kewargaan itu sendiri (Williams, Hinge, & Persson, 2008). Alasan pertama, sebagai fenomena kultural, nilai ketuhanan berkontribusi dalam sensitivitas antarbudaya karena fungsi keyakinan dalam religiusitas dapat berfungsi untuk mengasumsi batas-batas antar negara, dimana absensinya dapat mempengaruhi relasi antarindividu dalam

masyarakat. Kedua, nilai ketuhanan memiliki potensi sebagai sumber moralitas dan sumber modal sosial, dimana penggandengannya dengan demokrasi dapat mengarahkan pada *common good* atau kebaikan bersama. Yang ketiga, nilai ketuhanan sebagai fitur keberagaman sosial memiliki kemampuan untuk meningkatkan toleransi dan menekan fanatisme di tengah masyarakat.

SIMPULAN

Telah terbukti adanya hubungan Pancasila melalui kelima nilainya dengan kewarganegaraan. Secara khusus pada generasi muda kita hal ini setidaknya memberikan tanda bahwa remaja Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa masih menganggap pentingnya dua konsep ini.

Untuk pengembangan penelitian berikutnya, akan menjadi lebih apabila variabel lainnya mulai dipertanyakan. Perbandingan antarkebudayaan atau antaretnis misalnya patut dipertimbangkan. Tingkat identifikasi diri terhadap kelompok yang dirujuk oleh para remaja juga perlu dilihat, misalnya apakah lebih mengidentifikasi diri sebagai remaja Indonesia, remaja etnis tertentu atau bahkan mengidentifikasi sebagai generasi X, Y atau Z. Hal ini patut dipertimbangkan karena situasi lapangan tidaklah sama dengan situasi konseptual.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu El-Haj, TR. *I was born here, but my home, it's not here: Educating for democratic citizenship in an era of transnational migration and global conflict*. *Harvard Educational Review*. Fall 2007. No. 3, Vol 77.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daroeso, B. (1989). *Dasar dan konsep pendidikan moral pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dewi, R. I., Soemiarno, S., Poerbasari, A. S., & Meinarno, E. A. (2013). *Mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi A: Bangsa, Negara, dan Pancasila*. Depok: Universitas Indonesia. Penggunaan internal.
- Ghazi, S. R., et al. (2011). "Content Analysis of Textbooks of Social and Pakistan Studies for Religious Tolerance in Pakistan". *Asian Social Science*; Vol. 7, No. 5; Canadian Center of Science and Education 145.
- Hart, D., Richardson, C., Wilkenfeld. (2011). *Civic identity*. Dalam handbook of identity theory and research. Ed.: Seth Schwartz, KOen Luyckx, Vivian L. Vignoles. Springer. New York.
- Hidayat. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan keagamaan. Dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter warga negara*. Penyunting: Dasim Budimansyah dan Prayoga Bestari. Widya Aksara Press dan Laboratorium PKN UPI. Bandung.
- Josic, J. (2011). *Critical Understanding of U.S. Youths' Citizenship: Community Belonging and Engagement of "Successful Citizens"*. A dissertation submitted to the faculty of graduate school of the University of Minnesota.

- Juneman., Putra, F., Meinarno, EA. (2012). *Kompatibilitas keutamaan karakter dengan nilai-nilai Pancasila: Perspektif kontrak psikologis dan kontrak sosial*. Prosiding SNaPP 2012. Bandung.
- Juneman, Meinarno, EA., Rahardjo, W. *Symbolic meaning of money, self esteem, and identification with Pancasila values International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science/ICIBSOS*. 2012, 1-2 December, Jakarta, Indonesia
- Juneman., Meinarno, EA. (2013). *Semakin kental identitas religious semakin lunturkah identitas nasional? Peran keberpancasilaan pada remaja Indonesia. Dalam buku Menongkah arus globalisasi: Isu-isu psikologi di Malaysia dan Indonesia*. Penyunting Jas Laile Suzana, Yahaya Mahamood dan Zahari Ishak. Diterbitkan oleh Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur.
- Kaelan. (2012). *Problem epistemologis empat pilar berbangsa dan bernegara*. Yogyakarta. Penerbit Paradigma Yogyakarta.
- Kimber L. Bogard and Lonnie R. Sherrod. *Citizenship attitudes and allegiances in diverse youth. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*. 2008, Vol. 14, No. 4, 286–296
- Kumar, R. (1996). *Research methodology: A step by step guide for beginners*. London: SAGE Publication.
- Latif, Y. *Soekarno sebagai penggali Pancasila*. Prisma Vol. 32, No. 2 & 3, 2013. Hlm. 17-42.
- Maftuh, B. (2008). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. *Jurnal Educationist*, 2(2), 134-144.
- Mashoedi, SF., Mahardini, G., Carolina, C. (2012). *Nilai Pancasila dan Kewargaan Indonesia: Adakah Hubungannya?* Prosiding Seminar Nasional Psikologi Universitas Paramadina. Jakarta, 6 September 2012.
- Meer, N. (2010). *Citizenship, identity, and the politics of multiculturalism: the rise of muslim consciousness*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Meinarno, E. A. (2010). *Sebuah gambaran mencari ikatan nilai-nilai dari cerita rakyat Indonesia dan nilai-nilai pancasila: Konteks Sumatra dan Jawa*. Dipaparkan pada kongres HIMPSI di Surakarta.
- Meinarno, EA., Suwartono, C. *The measurement of Pancasila: An effort to make psychological measurement from Pancasila values*. *Jurnal Ilmiah Mind Set*. Vol. 2 No. 2, Juni 2011.
- Meinarno, EA., Suwartono, C. *Value orientation scale: The validation of the Pancasila scale*. *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*. Vol. 1, No. 2, Juli 2012. Hlm. 175-183.
- Meinarno, E. A., Widiyanto, B., & Halida, R. (2011). *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Ed. 2. Jakarta. Salemba Humanika.
- Meinarno, E. A., Widiyanto, B., & Halida, R. (2015). *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Ed. 3. Jakarta. Salemba Humanika.
- Meinarno, EA., Suwartono, C. (2013). *Identitas etnis, Pancasila, dan identitas nasional: Remaja Indonesia menatap masa depan*. Dalam buku *Menongkah arus globalisasi: Isu-isu psikologi di Malaysia dan Indonesia*. Penyunting Jas Laile Suzana, Yahaya Mahamood dan Zahari Ishak. Diterbitkan oleh Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur.
- Meinarno, EA., Juneman. *Validasi konkuren skala keber-pancasila-an pada remaja majasiswa di Jakarta*. *Insan Media Psikologi*. Vol. 14 No 1, April 2012. Hlm. 1-13.
- Meinarno, EA. *Pancasila dan Merah Putih di Serambi Mekah*. *Jurnal Pancasila* Vol. 1., No. 1, hlm. 52-59. Februari 2014.
- Kemdiknas. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. Diakses 13 Juli 2012, dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>
- Okuma-Nyström, MK. (2009). *Globalization, Identities, and Diversity in School Education*. Dalam *Nation-Building, Identity and Citizenship Education: Cross-cultural Perspectives*. Penyunting: Joseph

- Zajda, Holger Daun, Lawrence J. Saha. Springer. Melbourne.
- Oomen, T. K. (2009). *Kewarganegaraan, kebangsaan, dan etnisitas: mendamaikan persaingan identitas*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Puragabaya, AP. (2012). *Peran rasa percaya terhadap pemerintah sebagai mediator hubungan antara deprivasi relatif dengan patriotisme, nasionalisme, dan kewarganegaraan*. Tesis strata dua Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Quijada, D A. *Reconciling research, rallies, and citizenship: reflections on youth-led diversity workshops and citizenship: Reflections on youth-led diversity workshops and intercultural alliances*. *Social Justice*; 2008; 35, 1.
- Robles-Fernandez, R. (2011). *Youth engagement: a study of the impact of students' beliefs and attitudes towards civic participation*. A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Urban Education in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York.
- Rokeach, M. (1973). *The nature of human values*. New York: Free Press.
- Sarbaini. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter dalam upaya rekonstruksi dan reaktualisasi patriotisme waraga negara. Dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter warga negara*. Penyunting: Dasim Budimansyah dan Prayoga Bestari. Widya Aksara Press dan Laboratorium PKn UPI. Bandung.
- Suryadi, HD. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan dalam tinjauan siyasah syar'iyah. Dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter warga negara*. Penyunting: Dasim Budimansyah dan Prayoga Bestari. Widya Aksara Press dan Laboratorium PKn UPI. Bandung.
- Suneki, S. (2011). *Humanism Pancasila: Pendekatan metafisika sila ke II Pancasila dan relevansinya dengan problem umum kemanusiaan dewasa ini. Dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter warga negara*. Penyunting: Dasim Budimansyah dan Prayoga Bestari. Widya Aksara Press dan Laboratorium PKn UPI. Bandung.
- Suwartono, C., Meinarno, EA. (2011). *Construct validation of Pancasila Scale: An empirical report*. Dipaparkan dalam acara ICRAS, Yogyakarta, Juli 2011.
- Suwartono, C., Meinarno, EA. *Value orientation scale: The validation of the Pancasila scale*. *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*. Vol. 1, No. 3, Juli 2012.
- Williams, K., Hinge, H., & Persson, B. L. (2008). *Religion and citizenship education in Europe*. CiCe Thematic Network Project.